

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Konflik

Kata konflik mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan: sifat-sifat kekerasan dan penghancuran. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa: hal-hal baru, pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai: akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula.¹¹

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan.¹²

Konflik menurut Karl Marx, hakikat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah satu kenyataan sosial yang bisa ditemukan dimana-mana. Bagi Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antar

¹¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Hal. 213

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), Hal. 86

individu, konflik antar kelompok, dan bahkan konflik antar bangsa. Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Marx, adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material.¹³

Menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- a. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.
- b. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya pertentangan pendapat kepentingan, atau pertentangan individu).
- c. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan dan perseteruan.

Istilah konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan dan kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, anggota kelompok, maupun terhadap masyarakat. Sebaliknya konflik juga dapat membangun kekuatan yang konstruktif dalam hubungan kelompok. Konflik merupakan suatu sifat dan komponen yang penting dari proses kelompok, yang terjadi melalui cara-cara yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.¹⁴

Sedangkan menurut Pruitt dan Rubin, “konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan. (Perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak

¹³ George Ritzer dan Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 73

¹⁴ Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), Hal. 158

dicapai secara simultan”. Jika memahami konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor yang terlibat di dalamnya. Artinya di dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), dan konflik antar negara (*interstate conflict*).

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian.¹⁵

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti pendapat Simmel bahwa ada keagresifan atau permusuhan dalam diri seseorang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara benci dan cinta hadir. Coser memberikan dua dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik:

- a. Konflik realistik: memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah

¹⁵ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 5-6

memperoleh sumber perebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik.

- b. Konflik non-realistis: konflik terjadi karena didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya.

Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal yang mampu memperkuat identitas konflik. Ia menyatakan "konflik membuat batasan diantara dua kelompok". Dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas kelompok dalam sistem. Selain konflik eksternal, konflik internal memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku, ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok sehingga perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi suatu kelompok.¹⁶

Konflik mengandung suatu pengertian tingkah laku yang luas daripada yang biasa dibayangkan orang dengan mengartikannya sebagai pertentangan yang kasar dan perang. Dasar konflik berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat beberapa elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik, yaitu:

¹⁶ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 54-56

- a. Terdapatnya dua unit atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlihat di dalam konflik.
- b. Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap maupun gagasan-gagasan.
- c. Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut.
- d. Perbedaan kepentingan antar kelompok, serta keinginan untuk memenangkan kemauanya sendiri.

Adapun bentuk-bentuk konflik yang akan menggambarkan persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada, antara lain:

- a. Pada taraf di dalam diri seseorang

Yaitu konflik yang menunjukkan adanya pertentangan, ketidakpastian, atau emosi-emosi dan dorongan-dorongan yang antagonis di dalam diri seseorang.

- b. Pada taraf kelompok

Konflik-konflik ditimbulkan dari konflik-konflik yang terjadi di dalam diri individu dari perbedaan-perbedaan pada para anggota kelompok dalam tujuan-tujuan, nilai dan norma, motivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok, serta minat-minat mereka.

- c. Pada taraf masyarakat

Konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai dan norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma kelompok lain di dalam

masyarakat tempat kelompok yang bersangkutan berada. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma serta minat.

Selain itu terdapat tipe-tipe konflik, antara lain: tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan.

- a. Tanpa konflik: menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan-hubungan antar kelompok bisa saling memenuhi dan damai, tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, akan tetapi ada kemungkinan atas situasi ini.
 - 1) Pertama: Masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah politik kekerasan.
 - 2) Kedua: sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.
- b. Konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar biasa ditangani.
- c. Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.
- d. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.¹⁷

¹⁷ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 92-93

Bentuk konflik dalam penelitian ini yaitu pada taraf masyarakat, Konflik bersumber pada perbedaan diantara nilai dan norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma kelompok lain di dalam masyarakat tempat kelompok yang bersangkutan berada. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma serta minat. Pengusaha penggalian sirtu telah melanggar nilai dan norma yang telah disepakati bersama dengan masyarakat Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Dan menciptakan nilai-nilai dan norma yang baru yang tidak diketahui oleh masyarakat Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk memberontak dan menutup usaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini, konflik masyarakat desa dengan pengusaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan konflik terbuka. Yaitu situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.

2. Pengertian Masyarakat Desa

Masyarakat yaitu sejumlah manusia yang merupakan kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang

sama.¹⁸Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan objek penelitiannya pada masyarakat pedesaan Dusun Watuumpak saja. Hal ini bertujuan agar pembahasan penelitian ini lebih jelas.

Masyarakat sering dikelompokkan berdasarkan cara utamanya dalam mencari penghasilan atau kebutuhan hidup. Beberapa ahli ilmu sosial mengelompokkan masyarakat sebagai: masyarakat pemburu, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif disebut juga sebagai masyarakat peradaban. Sebagian pakar beranggapan masyarakat industri dan post-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari kelompok masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat bisa juga diorganisasikan atas dasar struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, suku, terdapat dan masyarakat negara.

Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan individu dan kelompok sosial dan masyarakat selalu berubah.¹⁹

Desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga Negara atau anggota masyarakat yang sangat kuat dan mempunyai hakikat didalam dirinya.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal.26

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hal.26

Seperti halnya dalam penelitian ini, ada beberapa anggota masyarakat yang diresahkan dan dirugikan oleh pengusaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak, karena belum membayar kekurangan sisa pembayaran tanah yang dibeli. Dan menggali tanah melewati batas kedalaman penggalian serta menggali tanah melewati batas wilayah galian. Masyarakat desa memiliki ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, dan solidaritas tinggi. Begitu juga pada masyarakat di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpendak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto rasa senasib sepenanggungan telah melekat pada diri individu di masyarakat Dusun Watuumpak, hal ini ditandai dengan pemberontakan dan menolak untuk tetap beroperasinya lokasi penggalian di Dusun Watuumpak oleh seluruh masyarakat Dusun Watuumpak.

Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”. Masyarakat pedesaan juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya bahwa, seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan

bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Adapun yang dijadikan ciri-ciri masyarakat pedesaan, antara lain sebagai berikut: a) Setiap warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan warga masyarakat di luar batas-batas wilayahnya. b) sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. c) sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.

Dari beberapa pengertian masyarakat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekelompok atau sekumpulan manusia yang hidup bersama dan tinggal di suatu wilayah serta terikat oleh suatu sistem dan adat istiadat tertentu yang telah disepakati.

Didalam masyarakat pedesaan kita mengenal berbagai macam gejala, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial. Gejala-gejala sosial yang sering diistilahkan dengan konflik, kontroversi dan kompetisi.

3. Pengusaha Penggalan sirtu

Pengusaha penggalan sirtu adalah seorang pengusaha atau pemilik modal yang berprofesi sebagai pemborong lahan atau sawah yang nantinya

akan dijadikan sebagai tempat penggalian sirtu. Pemilik modal atau pengusaha membeli lahan atau sawah dengan harga yang mahal sampai dua kali lipatnya harga jual tanah pada umumnya. Akan tetapi pengusaha membeli tanah tidak untuk dimiliki selamanya melainkan hanya diambil sirtunya saja, setelah material sirtunya sudah habis tanah yang sudah dibeli oleh pemilik modal atau pengusaha dimiliki lagi oleh pemilik tanah tersebut.

Dalam hal ini berbeda dengan penggalian sirtu yang dilakukan di sungai karena penggalian yang dilakukan di sekitar sungai masih bersifat tradisional dan dominan menggunakan tenaga kerja manusia. Cara pengerjaannya masih bersifat tradisional dan membahayakanyaitu dengan cara menyelam di sungai sambil membawa anyaman yg terbuat dari bambu (rengkek) yang fungsinya sebagai tempat dimana mengambil sirtu di dasar sungai dan dipanggul sampai ke atas permukaan tanah atau bahu jalan. Untuk mengumpulkan sirtu 1 truk membutuhkan waktu 1 hari (dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore) itupun dikerjakan oleh 2 orang. Jika sirtu sudah terkumpul 1 truk biasanya sudah ada pembeli yang datang untuk membeli sirtunya. Harganya untuk sirtu satu truk yaitu Rp 150.000. Penggalian sirtu manual atau yang dilakukan di sungai ini termasuk penggalian sirtu liar karena tidak mempunyai izin galian.

Berbeda dengan penggalian sirtu dalam penelitian ini. Seorang pengusaha memborong atau membeli tanah yang akan dijadikan tempat penggalian sirtu kemudian akan dilaksanakan penggalian sirtu di lahan

tersebut dengan menggunakan alat berat (Bego) untuk kegiatan penggalian sirtu. Pemilik modal atau pengusaha tidak ikut bertindak dalam aktivitas penggalian sirtu melainkan hanya mengawasi saja kegiatan usaha penggalian sirtunya. Karena pemilik modal atau pengusaha penggalian sirtu memiliki berbagai karyawan untuk kegiatan beroperasinya usaha penggalian sirtunya. Antara lain:

- a. Operator adalah karyawan yang mempunyai kedudukan sebagai menjalankan atau mengoperasikan alat berat yang disebut BEGO untuk melakukan penggalian sirtu.
- b. Ngeker adalah karyawan yang mempunyai tugas sebagai mencatat dan mengawasi material sirtu yang keluar atau dibeli oleh konsumen dengan menggunakan truk.
- c. Karyawan serabutan adalah karyawan yang mempunyai tugas untuk membantu dalam kelancaran beroperasinya usaha penggalian sirtu. Karyawan serabutan biasanya bertugas untuk membeli solar di premium untuk bahan bakar alat berat (BEGO), memenuhi kebutuhan makan untuk karyawan lain, serta merawat dan memperbaiki jalan yang rusak untuk sarana keluar masuknya truk ke lokasi penggalian sirtu.

Pengusaha penggalian sirtu jika ingin memiliki tempat usaha penggalian sirtu terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah membeli tanah atau lahan yang akan digali, masyarakat setempat serta pemerintah desa menyetujui keberadaan tempat usaha penggalian sirtu. Selain itu

pengusaha penggalian sirtu harus mempunyai izin galian. Yakni pengusaha penggalian sirtu harus mengurus perizinan ke Kepala Badan Pelayanan perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM), izin harus dilengkapi beberapa persyaratan sebelum ditandatangani bupati. Diantaranya lahan minimal 5 hektar, melengkapi empat dokumen yakni Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Angkut Sementara (IAS) dan izin IOP Operasi Produksi.

Pengurusan perizinan bertujuan untuk melegalkan usaha penggalian sirtu dan mempunyai kekuatan hukum jika sewaktu-waktu ada razia dan pemeriksaan kepolisian serta badan perizinan. Karena jika pengusaha penggalian sirtu tidak memiliki izin galian akan mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian dan dianggap sebagai penggalian sirtu liar.

Yang terpenting untuk membuka usaha penggalian sirtu adalah masyarakat setempat dan masyarakat yang memiliki tanah atau lahan yang akan digali menyetujui. Masyarakat merupakan kumpulan elemen-elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan terbentuk oleh aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu masyarakat bagian yang terpenting dalam semua hal. Sebuah contoh Pemimpin dikatakan berhasil jika mampu menjadi panutan dari bawahan atau masyarakat.

B. Kerangka Teoretik

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan paradigma fakta sosial, paradigma fakta sosial yaitu individu dipandang sebagai sesuatu yang

tidak kreatif karena dipaksa, dibatasi dan ditentukan oleh fakta-fakta sosial dan pranata sosial. Paradigma fakta sosial bisa menjelaskan atau menggambarkan tentang permasalahan yang peneliti rumuskan. Dalam paradigma fakta sosial terdapat teori konflik, penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik untuk membaca dan menerangkan realitas yang sedang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan teori konflik, karena masyarakat merupakan arena dimana satu kelompok dengan yang lain saling bertentangan antara kalangan masyarakat desa serta orang yang berkepentingan dengan pengusaha penggalian sirtu yang akan melakukan perluasan wilayah yang akan dijadikan tempat usaha penggalian sirtu.

Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendrof, teori konflik yang dipaparkan oleh Ralf Dahrendorf disebut teori konflik dialektik. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Kita tidak akan mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Tidak akan pernah ada demonstran jika pemimpin tidak menyalahgunakan wewenang. Demikian sebaliknya, konflik bisa menghantar orang kepada konsensus. karyawan dipenuhi keinginan oleh pemimpin untuk kenaikan upah sesudah mereka melakukan aksi demonstran terhadap pemimpin.²⁰

Konsensus adalah kesepakatan bersama yang dilakukan oleh antar individu, antar kelompok maupun antar negara. Konflik masyarakat desa dengan pengusaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebelumnya sudah ada konsensus

²⁰ Bernard Raho. SVD, *Teori sosiologi modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), Hal: 77-78

oleh masyarakat Dusun Watuumpak dengan pengusaha pengalihan sirtu yang dijembatani oleh pemerintah desa. Akan tetapi pengusaha penggalian sirtu telah melanggar konsensus yang sudah disepakati bersama, hal ini yang menyebabkan konflik terjadi.

Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan terus menerus di antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, dan melihat akan adanya setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat,²¹ jadi dalam pandangan teori ini keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.

Dari penjelasan di atas maka seperti halnya dalam masyarakat di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ini, asal mula terjadinya konflik pemilik modal atau bapak Suwartono (pengusaha penggalian sirtu) telah melanggar kesepakatan yang disepakati bersama dengan warga Dusun watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Yaitu mengali melewati batas lahan galian di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten

²¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 26

Mojokerto dan menggali lahan yang dibebaskan atau digunakan sebagai jalan umum. Dan melanggar kesepakatan awal yaitu menggali tanah atau lahan dengan kedalaman 5 meter, akan tetapi pemilik modal atau bapak Suwartono menggali lahan atau tanah dengan kedalaman 10 meter. Bapak Suwartono hanya menjalankan satu tujuan yang berbeda dan ingin meningkatkan perekonomiannya sendiri tanpa melihat serta menghiraukan kerugian-kerugian lingkungan masyarakat Dusun watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto akibat usaha penggalian sirtu.

Yang termasuk melanggar nilai dan norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat Dusun watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Untuk tujuan memfungsikan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini dapat mempengaruhi bahwa masyarakat bukan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Melainkan ketidaksesuaian yang mengakibatkan adanya struktur-struktur baru akan membawa dampak yang tidak diinginkan oleh masyarakat Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu terjadilah pertentangan antara masyarakat desa yang diresahkan, dirugikan dan ingin menutup aktivitas penggalian sirtu Dusun Watuumpak dengan pemilik modal bapak Suwartono sebagai pengusaha penggalian sirtu serta pihak yang berkepentingan terhadap terus beroperasinya lokasi penggalian sirtu tersebut.

Teori konflik lebih menitik beratkan analisisnya pada unsur-unsur terciptanya suatu aturan atau tertib sosial. Perspektif konflik lebih

menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan tidak seimbangnya distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan dimiliki oleh orang-orang elit,²² seperti halnya lokasi penggalian tersebut pemilik modal sangatlah berkuasa tanpa menghiraukan kerusakan tanah dan lingkungan akibat dari usaha penggalian sirtunya. Pemilik modal atau bapak suwartono untuk melancarkan terus beroperasinya usaha penggalian sirtunya. Dengan kekayaan yang dimiliki seenaknya memberi hadiah dan imbalan yang luar biasa kepada perangkat-perangkat pemerintahan desa, khususnya kepala Desa Kepuhpandak, kepala Dusun Watuumpak serta beberapa orang yang terlibat dalam kelancaran terus beroperasinya usaha penggalian sirtunya. Akan tetapi semua itu tanpa sepengetahuan warga atau masyarakat Dusun Watuumpak yang merasa dirugikan oleh pengusaha penggalian sirtu.

Dahrendorf memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas. Bahwa berbagai gagasan dalam posisi masyarakat mempunyai kualitas dan otoritas yang berbeda, otoritas tidak terletak pada diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tidak akan tertarik dengan struktur posisi, dan tugas pertama dalam analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran-peran otoritas di dalam masyarakat.²³

Kemudian otoritas juga tidak selalu konstan karena ia terletak pada posisi, bukan dalam diri orang yang melakukan, oleh karena itu seseorang yang berwenang dalam suatu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula dengan seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam suatu kelompok, mungkin dapat

²² J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) Hal. 117

²³ Douglas J. Goodman, George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), Hal.154

menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain. Ini berdasarkan argumen dari Dahrendorf yang ia sebut masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi.

Seperti halnya dalam penelitian ini, beberapa perangkat atau anggota yang menjabat di pemerintah desa sudah menyalahgunakan wewenang yang awalnya ikut membuat kebijakan atau kesepakatan bersama antara masyarakat dusun Watuumpak dengan pengusaha penggalian sirtu yang dijemputani oleh aparat-aparat pemerintah desa serta semua pihak yang bersangkutan dengan usaha penggalian sirtu ini telah melanggar kesepakatan awal yang telah disahkan bersama. Pengusaha penggalian sirtu menduduki kekuasaan superordinat, dengan terus melancarkan keinginannya sendiri yaitu menggali sirtu melewati batas kedalaman dan batas wilayah galian. Pemerintah desa berada pada posisi subordinat karena tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan dan menutup beroperasinya usaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak. Karena sudah mendapatkan hadiah atau imbalan dari pengusaha penggalian sirtu untuk diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas pelanggaran kesepakatan yang disahkan bersama oleh pengusaha penggalian sirtu. Padahal seharusnya pemerintah desa mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memberi sanksi kepada pelanggar nilai dan norma yang sudah disepakati bersama.

Sedangkan menurut konsep yang di ambil dari Pareto, Mosca dan Raymon Aron, “Konflik lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan otoritas

manusia sendiri dari pada oleh penindasan, eksploitasi, penyalahgunaan otoritas dan isu-isu lainnya”.²⁴

Hal ini dikarenakan bahwa antara individu yang satu dengan individu yang lainnya mempunyai tingkat otoritas yang berbeda-beda, kelompok atau individu yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi disebut kelompok superordinat, sedangkan kelompok yang diatur adalah tingkat otoritasnya lebih kecil disebut subordinat. Dan kelompok superordinat merasa mempunyai hak untuk mengatur kelompok yang ada di bawahnya yaitu subordinat.

Dengan pengertian lain masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang tujuannya saling berbeda dan mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Dan kelompok tersebut menggambarkan adanya usaha untuk mendapatkan peluang dan keuntungan yang lebih dari kelompok lain dan menentukan tindakan-tindakan tertentu sehingga bisa mendapatkan keuntungan, meskipun dapat merugikan kelompok lain.

Dalam menganalisis konflik masyarakat, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Dahrendorf menggabungkan pendekatan fungsional (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan pendekatan konflik dalam menganalisis antar kelas sosial masyarakat.

Begitu pula dalam masyarakat Dusun watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Mereka yang memiliki keyakinan kuat terhadap nilai dan norma yang telah disepakati bersama akan tidak setuju

²⁴ Irving M Zeitling, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Hal 179

dengan penyalahgunaan dan penentangan nilai dan norma oleh pengusaha penggalian sirtu yang ada di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Karena usaha penggalian sirtu tersebut tidak menempati posisi yang superordinat, maka otoritas secara fakta terletak pada orang-orang pemilik modal atau pengusaha penggalian sirtu tersebut untuk mendatangi orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Yaitu pemerintah desa yang awalnya menduduki posisi superordinat dengan diberi imbalan atau hadiah yang bertujuan untuk diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa sehingga menduduki posisi subordinat.

Dahrendorf membedakan golongan masyarakat yang terlibat konflik itu atas dua tipe, yaitu:

1. Kelompok Semu (*Quasi Group*)

Kelompok ini merupakan kumpulan dari pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena adanya otoritas dan kelompok kepentingan. Dalam penelitian ini yang merupakan kelompok semu adalah pengusaha penggalian sirtu dan pemerintah desa.

2. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok ini merupakan kelompok kepentingan yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota jelas, dan kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya

konflik dalam masyarakat.²⁵ Dalam penelitian ini yang merupakan kelompok kepentingan adalah pemilik tanah dan masyarakat Dusun Watuumpak.

Pada dasarnya karakter yang melekat pada manusia adalah egois dan ingin berkuasa. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pencaharian manusia terhadap otoritas, sedangkan jumlah otoritas sendiri tidak sebanding dengan jumlah manusia yang menginginkan otoritas tersebut. Sehingga dapat terjadi persaingan yang cukup ketat untuk mendapat otoritas tersebut dengan persaingan dan persaingan dalam kepentingan tersebut akan menimbulkan perpecahan konflik antar individu atau kelompok.

Apabila dilihat lebih jauh kemunculan kelas baru serta pihak yang berkepentingan terhadap terus beroperasinya usaha penggalian sirtu akan menyebabkan semakin nampak perbedaan-perbedaan yang nampak serta pelanggaran nilai dan norma yang sudah disepakati bersama di masyarakat dusun Watuumpak. Pemerintah desa sama sekali tidak menanggapi pengaduan masyarakat Dusun Watuumpak atas penggalian sirtu di Dusun Watuumpak yang telah melewati batas kedalaman dan batas wilayah penggalian. Pemerintah desa memilih diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa atas pelanggaran nilai dan norma yang sudah disepakati bersama oleh pengusaha penggalian sirtu, masyarakat Dusun Watuumpak serta dijembatani oleh pemerintah desa. Dengan alasan

²⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 31

pemerintah desa mendapatkan hadiah atau imbalan dari pengusaha penggalian sirtu tanpa sepengetahuan masyarakat Dusun Watuumpak.

Menurut Ralf Dahrendorf konflik juga bisa mengantar orang atau kelompok kepada konsensus. Konflik masyarakat desa dengan pengusaha penggalian sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan konflik terbuka yang artinya konflik tersebut sudah muncul ke permukaan dan berakar yang mendalam seta perlu dicari penyelesaiannya. Masyarakat Dusun Watuumpak telah mengetahui bahwa kedalaman penggalian sirtu serta wilayah lokasi penggalian sirtu melewati batas yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat Dusun Watuumpak terutama pemilik tanah dengan pengusaha penggalian sirtu yang dijembatani oleh pemerintah desa. Masyarakat Dusun Watuumpak melakukan pertentangan untuk meminta ganti rugi dan penutupan usaha penggalian sirtu tersebut kepada pemilik modal dan mengadakan hal tersebut kepada pemerintah desa. Akan tetapi pertentangan yang dilakukan masyarakat dusun watuumpak tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena pemerintah desa diam saja dan tidak mengambil tindakan apa-apa serta tidak mendapatkan respon dari pengusaha penggalian sirtu.

Hal tersebut menyebabkan Kemarahan warga semakin memuncak. Masyarakat Dusun Watuumpak melakukan pemberontakan langsung ke tempat dimana usaha penggalian sirtu tersebut beroperasi. Warga langsung menghentikan paksa aktivitas pengoperasian usaha penggalian

sirtu dan membuat konsensus baru. Dari konflik yang terjadi masyarakat Dusun Watuumpak berhasil menutup usaha penggalian sirtu tersebut serta mendapatkan ganti rugi dari pengusaha penggalian sirtu.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Tradisi Penambangan Pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif hukum Islam dan pada Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 oleh elok Rahmawati jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2010.

Penelitian ini membahas tentang dampak lingkungan perspektif hukum, serta pandangan hukum Islam dan peraturan daerah provinsi Jawa Timur terhadap aktivitas penambang pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniati seorang Mahasiswi Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya Pola Interaksi Diantara Penambang Pasir Sungai Brantas di Desa Betro Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian skripsi ini peneliti memfokuskan pada interaksi diantara penambang pasir dan para penggalang. Serta dampak dari interaksi tersebut membawa dampak dari kesejahteraan pada masing-masing penambang. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Pola interaksi yang terjadi diantara para penambang pasir antara penggalang dan nyutat serta penggali pasir, dan apakah interaksi tersebut membawa dampak kesejahteraan pada masing-masing kelompok.

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfah Prodi Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Penambangan Pasir Liar di Sekitar Sungai Brantas di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Dalam Skripsi ini peneliti memfokuskan penelitiannya pada proses Penambangan Pasir Liar di Masyarakat sekitar sungai Brantas yang berada di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang serta mengetahui dampak penambangan pasir liar terhadap lingkungan masyarakat di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Mojokerto.

Pada penelitian yang saya lakukan tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh ketiga peneliti di atas. Penelitian saya memfokuskan pada bagaimana bentuk Konflik Masyarakat Dusun Watuumpak dengan Pengusaha Penggalan Sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, serta mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya Konflik Masyarakat Dusun Watuumpak dengan Pengusaha Penggalan Sirtu di Dusun Watuumpak Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.